

**LAPORAN KINERJA SKPD**  
**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA**  
**KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**  
**2024**



**Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian**

Alamat : Jalan Mawar No. 66 Kandangan Utara Kecamatan Kandangan

Telepon/Fax (0517) Email:

Website : <https://www.disnakerkukmp.hulusungaiselatankab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Januari 2025

KEPALA DINAS



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670328 198609 2 001

## **DAFTAR ISI**

	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1.3. Isu Strategis	13
	1.4. Dasar Hukum	14
	1.5. Sistematika Pelaporan	16
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
	2.1. Perencanaan Strategis	17
	2.2. Indikator Kinerja Utama	19
	2.3. Perjanjian Kinerja	23
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>25</b>
	3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	27
	3.2. Realisasi Anggaran	63
<b>Bab IV</b>	<b>PENUTUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan

target yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, bidang koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- g. Pelaksanaan administrasi Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

### **1. Sekretariat.**

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat yaitu :

- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Tenaga Kerja**

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## **4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta pemasaran dan promosi koperasi dan usaha mikro. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha mikro;
- b. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro;
- e. Evaluasi dan pelaporan program pengembangan dan

pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi Usaha Mikro terdiri dari :

**1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi**

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi
- c. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan kepada koperasi;
- d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi;
- e. Memfasilitasi kemitraan dan jaringan kerjasama usaha koperasi dan pemasaran/promosi produk koperasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi;
- g. Melaksanakan penilaian, pemeringkatan, serta penghargaan bagi koperasi
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis sistem pengendalian intern (SPI) koperasi

Memberikan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi dan bantuan konsultasi melalui petugas konsultasi koperasi lapangan;

Memberikan bimbingan dan pembinaan kelengkapan administrasi dan organisasi koperasi; Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi melalui bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan. Menyusun database koperasi; Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembinaan Koperasi; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai bidang tugas.

### **Bidang Perindustrian**

Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pembangunan sumber daya dan sarana prasarana industri, pengendalian informasi dan kerjasama serta pengawasan industri.

Bidang perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri;
- b. Penyusunan master plan, program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri;
- c. Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis perekayasaan, desain produk melalui fasilitasi/pendampingan, sosialisasi,
- e. menyiapkan bahan administrasi kelengkapan perizinan sektor industri;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri;
- g. Pembinaan dan pengendalian persaingan usaha serta legalisasi produk;
- h. Evaluasi dan pelaporan program informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri serta pemetaan kawasan industri; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**5. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pembentukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas di atur dalam peraturan Bupati.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



### **1.3. ISU STRATEGIS**

Berpedoman isu strategis RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya penyerapan angkatan kerja oleh lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Masih perlu ditingkatkan kualitas industri kecil yang bergerak di sektor industri pengolahan serta memiliki sertifikat mutu.
3. Masih perlu ditingkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil.

#### **1.4. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisa Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Tahun 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.5. SISTEMATIKA LAPORAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah :

**BAB I           PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematis Pelaporan.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Anggaran

**BAB IV          PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan Strategis Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran tujuan dan sasaran dari Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPD 2024-2026).

Rencana Strategis (Revisi) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis (Revisi) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra (Revisi) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

##### **a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4
	<b>Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)</b>

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024  
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

NO.	KINERJA UTAMA/ OUTCOME /TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawabkan secara periodik	Inspektorat Daerah
2.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja dari penduduk usia kerja pada tahun tertentu, angka ini diperoleh dari data BPS yang dirilis tiap tahun dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Badan Pusat Statistik
3.	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	Sikap dan kondisi usaha dengan semangat berwirausaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

			mengandalkan kemampuan sendiri	
4.	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha	Setiap pelaku usaha tentu ingin omset penjualan dan bisnisnya selalu meningkat. Agar semakin maju dan keuntungan berlipat, diperlakukan strategi khusus sebagai cara meningkatkan penjualan. Dengan adanya peningkatan penjualan maka omset akan naik, keuntungan semakin berlipat, usaha atau Perusahaan semakin berkembang	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
5.	Berkembangnya Produk Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas	UMKM naik kelas mengacu pada proses Dimana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan, kenaikan omset dan asset UMKM, bertambahnya tenaga kerja	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
6.	Terlaksananya Pengawasan Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pengawasan Koperasi adalah dengan melaksanakan pemeriksaan Kesehatan koperasi, dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan koperasi yang diatur dalam peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tentang nomor 9 Tahun 2020 Pengawasan Koperasi untuk Pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk meningkatkan pengetahuan SDM Koperasi yang memadai secara implisit akan memberikan dukungan yang besar bagi	Bidang Perindustrian

7.	Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase Peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	ndustri Kecil naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan, kenaikan omset dan aset Industri Kecil, bertambahnya tenaga kerja	
----	-------------------------------------	--	---	--



**TABEL 2.3**  
**TABEL ISIAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA**  
**KAB. HSS TAHUN 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE					
					2024		2025		2026	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja(angkatan kerjayang bekerja)	Persen	70,66%	69,66%	74,15%	73,15%	68,56%	67,56%
			Persentase Wirausaha baru yang mandiri	Persen	0,030%	0,030%	0,047%	0,047%	0,075%	0,075%
			Persentase pertumbuhan industri pengolahan	Persen	8,01%	8,01%	7,86%	7,86%	8,07%	8,07%
			Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan	Persen					4,75%	4,74%
				Persen						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE									
					2024		2025		2026					
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
			Persentase Koperasi Sehat			2,35%		6,78%				16,04%		18,52%



### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.4  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	97,90%
2.	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	Persen	0,11%
3.	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha	Persen	11,76%
4.	Berkembangnya Produk Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,52%
5.	Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha/UMKM yang Terdaftar di Katalog	Jumlah UMKM yang terdaftar e Katalog	Orang	146 orang
6.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Buah	40 buah
7.	Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	Persen	0,65%
8.	Meningkatkan Jumlah Produk Industri Kecil di E Katalog	Jumlah Industri Kecil di E katalog	Orang	146 orang

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,  
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan Tahun 2024**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 – 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Berdasarkan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Misi 2 Yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan dengan Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja dan Meningkatnya Intensifikasi industri Pengolahan dapat dilihat dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan data PDRB industri pengolahan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Per Tahun :

Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dicapai berkat beberapa usaha yang terus dilakukan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Instansi terkait lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan serta Instansi terkait lainnya di Kab. Hulu Sungai Selatan.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi.

Berikut disampaikan analisis terhadap tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2024 sebagai berikut:

TUJUAN 1	MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
----------	--

Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi pada capaian RPJMD yaitu pada Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.1

## Capaian Tujuan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

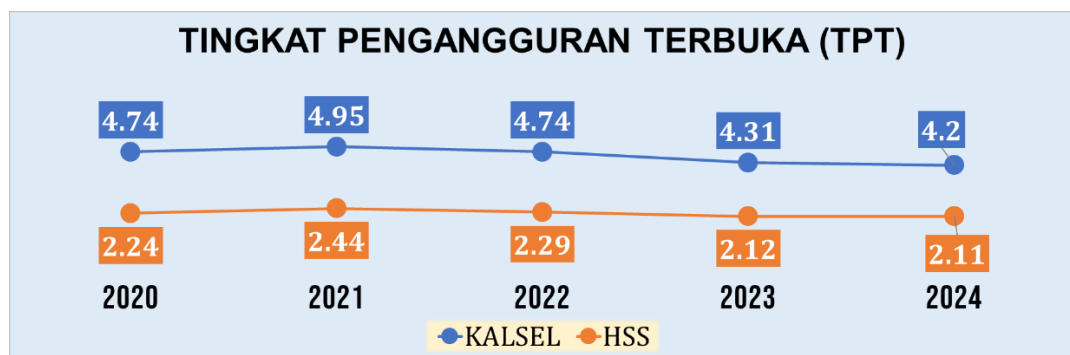
Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10	2,11	100,48

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,1%, sementara realisasi yang dicapai adalah 2,11%. Dengan capaian 100,47%. Berdasarkan kategori penilaian capaian masuk dalam kategori Sangat Baik ( $\geq 91\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan sangat efektif, dengan realisasi yang hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS Kab.HSS Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten HSS sebesar 2.11%. Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalsel yang mencapai 4.2%, dan paling rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalsel.

Gambar 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Prov. Kalimantan Selatan 2024



Sektor pertanian dan Perkebunan menyerap tenaga kerja terbanyak di Kab.HSS, setelah sektor jasa (Data Sakernas 2023). Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah HSS yang merupakan daerah agraris. Secara keseluruhan, HSS menunjukkan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi warganya dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Kalsel.

**TABEL 3.1**  
**SASARAN STRATEGIS**  
**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS**

	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja(TKK)	97,90%	97,89%	100%
2.	Meningkatnya wirausaha baru yang mandiri	Persentase Wirausaha baru yang mandiri	0,11%	0,11%	100%
3.	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Meningkatnya Volume Omset Usaha	11,76%	11,76%	100%
4.	Berkembangnya Produk Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas	0,52%	0,52%	100%
5.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha/UMKM yang terdaftar di Katalog	Jumlah UMKM yang terdaftar e-Katalog	146 orang	146 orang	100%
6.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	40 buah	40 buah	100%

7.	Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase Peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	0,65%	0,65%	100%
8.	Meningkatkan Jumlah Produk Industri Kecil e-katalog	Jumlah Industri Kecil e-katalog	146 orang	146 orang	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian tahun 2024 100% dengan kategori sangat baik.

Berikut disampaikan analisis atas pengukuran secara mandiri (self assessment) hasil pengukuran secara mandiri terhadap 4 (empat) tujuan dan 3

(Tiga) sasaran strategis serta 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran terdapat 4 (empat) sasaran yang pencapaiannya =100%

Ulasan pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja

19

Untuk mengukur capaian sasaran 1 diukur dengan indikator sebagaimana tabel dibawah ini yaitu :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI 2024	CAPAIAN
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	97,90%	97,89%	99,98%

Rata-rata untuk capaian sasaran 1 adalah 99,98% dengan kategori kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya lebih tinggi. Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

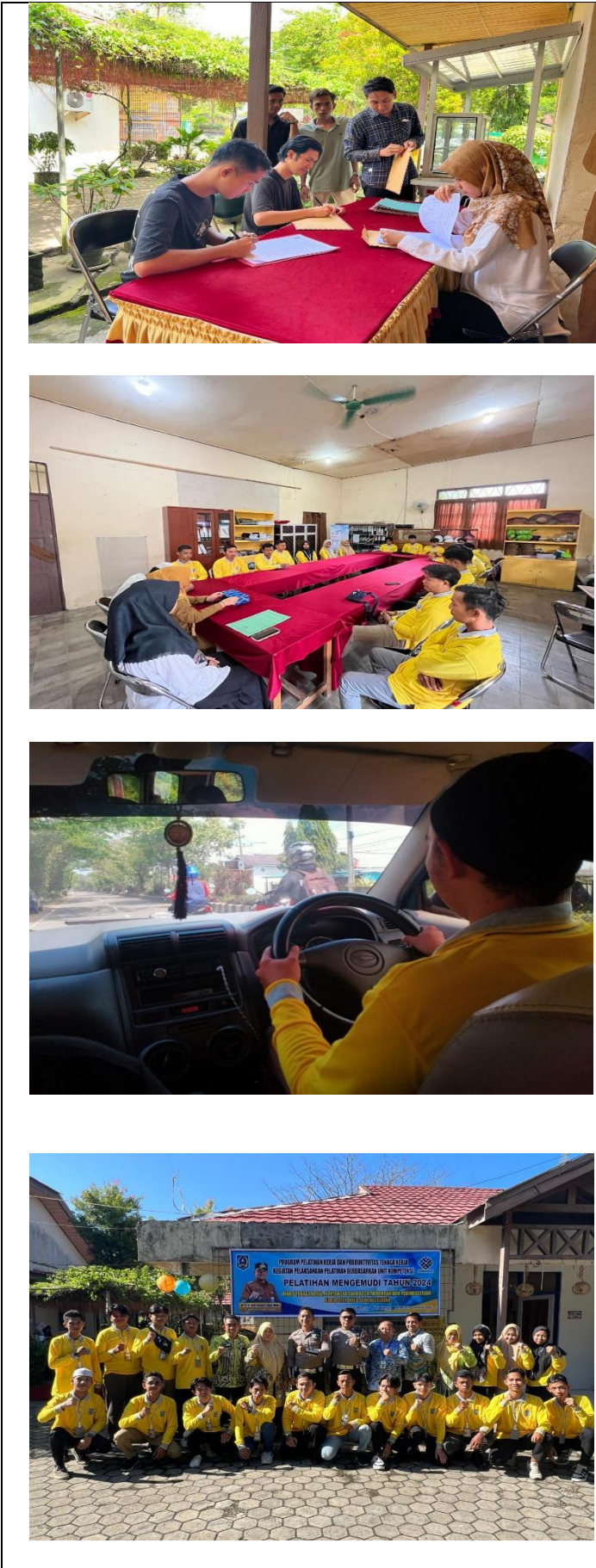
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat adanya penurunan indikator persentase penyerapan angkatan kerja (angkatan kerja yang bekerja) sebesar 9,66 % pada tahun 2024 dari pencapaian tahun 2024 . Hal ini dikarenakan

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator Persentase

penyerapan angkatan kerja yaitu:

**1. PELATIHAN MENGEMUDI**

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja  
 Berdasarkan klaster kompetensi



Pelatihan Mengemudi dengan peserta 20 orang di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan anggaran sebesar Rp. 64.806.750 ,-.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh ) hari pada Tanggal 25 Juli s/d 3 Agustus 2024 bertempat di LPK Al Falah yang beralamat Jl. Al. Falah Seberang Mesjid Raudah Kandangan Kab. HSS. Untuk Pelatihan diadakan seleksi tertulis dan wawancara dimana untuk info di share di sosmed IG Disnaker Kab.HSS dan Infoloker Kab HSS dan terbuka untuk masyarakat umum. Untuk Tes tertulis dan wawancara bertempat di Kantor DisnakerKUKM&P . Dan ada 1 (satu) orang peserta Disabilitas Fisik

Tujuan dari pelatihan ini antara lain adalah memberikan keahlian dan keterampilan kepada pencari kerja bagaimana pengemudi tentang praktik terbaik dan mencegah kecelakaan dan kesalahan saat mengemudi

**1. PELATIHAN TATA BOGA**

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja  
 Berdasarkan klaster kompetensi

		<p>Pelatihan Tata Boga dengan peserta 20 orang di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan anggaran sebesar Rp. 73.767.500 ,-.</p>
		<p>Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat ) hari pada Tanggal 15 Oktober s/d 18 Oktober 2024 bertempat di LPK Marlina dari Banjarbaru yang dilaksanakan di SKB beralamat Jl Baluti Desa Tibung Raya Kandangan Kab. HSS</p>
		<p>Untuk Pelatihan diadakan seleksi tertulis dan wawancara dimana untuk info di share di sosmed IG Disnaker Kab.HSS dan Infoloker Kab HSS dan terbuka untuk masyarakat umum. Untuk Tes tertulis dan wawancara bertempat di Kantor DisnakerKUKM&amp;P . Ada 2 (Dua) orang peserta dari penyandang disabilitas yaitu Disabilitas Rungu dan Disabilitas Grahita.</p>
		<p>Tujuan pelatihan adalah Mencetak tenaga kerja mandiri yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain (wirausaha).</p>

**1. PELATIHAN OPERATOR ALAT BERAT**

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan klaster kompetensi



Pelatihan operator alat berat dengan peserta 20 orang di ambil dari 17 (tujuh belas ) desa yang ada kecamatan Padang Batung yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan anggaran sebesar Rp. 85.265.450 ,- (Delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah)..

Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pada Tanggal 5 November s/d 14 November 2024 bertempat di DesaTawia Kecamatan Angkinang dengan Instruktuir dari Poliban Banjarmasin Untuk Pelatihan diadakan seleksi tertulis dan wawancara di Kantor Camat Padang Batung Kab.HSS

Tujuan pelatihan adalah Memberikan pengetahuan dan keterampilan secara terpadu bagi pencari kerja dalam menangani dan meoperasikan alat berat dengan baik dan benar, agar terciptanya efektivitas dan efisiensi produktivas dan keselamatan kerja yang meningkat





## 1. PELATIHAN MENJAHIT



Pelatihan Menjahit dengan peserta ... orang di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada Tanggal 19-21 Mei 2024 bertempat Ponpes Ibnu Masud Putri.

1. PELAYANAN PEMBUATAN/ PENERBITAN KARTU AK-1 /SIAP KERJA

Program Penempatan Tenaga Kerja  
Sub Kegiatan Pelayanan Antar kerja

		<p>Pelayanan pembuatan/ penerbitan kartu AK-1 di MPP (Mall Pelayanan Publik) yang beralamat di Pasar Los Batu Kandangan. Peningkatan layanan penempatan tenaga kerja secara offline di MPP melalui aplikasi Siap Kerja dengan anggaran sebesar Rp.51.999.950,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah )</p>
		
		

## 2. PEMAGANGAN

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

   	<p>Pemagangan dilaksanakan di Perusahaan Tambang PT. BSS (Bina Sarana Sukses) yang ada Di Kecamatan Sungai Raya, PT. SAM (Surya Agro Makmur) Kecamatan Daha Selatan , PT.SLS (Surya Langgang Sejahtera) Kecamatan Kalumpang di bidang Sawit serta di DisnakerKUKM&amp;P Kab Hulu Sungai Selatan .Untuk peserta meliputi kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk Pemagangan diadakan seleksi tertulis dan wawancara dimana untuk info pemagangan di share di sosmed IG Disnaker Kab.HSS dan Infoloker Kab HSS. Tes Wawancara langsung di perusahaan yang ditempatkn bertempat di Kantor DisnakerKUKM&amp;P Untuk peserta yang mengikuti pemagangan sebanyak 20 ( dua puluh) Orang terdiri 10 (sepuluh) orang untuk PT.BSS. Untuk PT SAM 3 (tiga) orang, PT SLS 6 (enam) Orang dan 1 satu ) orang DisnakerKUKM&amp;P. Dimana ada 3 (tiga ) orang Peserta Disabilitas untuk 2(dua) di PT.BSS Tuna Rungu dan Grahita satunya Disabilitas Fisik DisnakerKUKM&amp;P untuk anggaran sebesar Rp. 50.991.300,- (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu tiga ratus rupiah). . Kegiatan ini dilaksanakan3 (tiga) bulan dari Bulan Juli sampai September tahun 2024 .</p> <p>Pemagangann bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi ilmu ke pekerjaan</li> <li>2. Mempelajari berbagai soft skill dan hard skill</li> <li>3. Meningkatkan wawasan dan kompetensi pencari kerja</li> <li>4. Mengurangi angka pengangguran terbuka</li> </ol>
--	--

Rencana Tindak Lanjut (action Plan) untuk meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja(TKK) :

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai payung hukum pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan di Kab. Hulu Sungai Selatan yang bertujuan memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.

2. Kick Off dan pembukaan semua pelatihan, pemagangan, bintek, workshop dan fasilitasi bagi tenaga

kerja, koperasi dan UKM serta pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang bertujuan memperluas lapangan kerja, mencetak wirausaha baru dan mengembangkan pengusaha yang adam

3. Giat Posko THR Keagamaan, Peringatan Hari Buruh dan Penandatanganan MoU pemenuhan jaminan social bagi pekerja di Kab. Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan layanan dan fasilitasi dalam Upaya perlindungan hak-hak pekerja/buruh
4. Fasilitasi aplikasi SIAP KERJA berupa bimbingan dan pembuatan akun SIAP KERJA untuk pencari kerja terdaftar saat proses pembuatan kartu AK I untuk perluasan informasi ketenagakerjaan
5. Giat layanan ketenagakerjaan inklusif melalui pembinaan dan fasilitasi kepada warga miskin ekstrim dan penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja mandiri dan pemagangan di Perusahaan.

6.

## Sasaran Strategis 2 : MENINGKATNYA WIRAUSAHA BARU YANG MANDIRI

7.

Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
Persentase Wirausaha baru yang mandiri	0,11%	0,11%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat ada capaian sebesar 0,11 persen pada tahun 2024, hal ini dikarenakan ada kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya permintaan pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran diatas yaitu :

### 1. Pelatihan Kerajinan Tangan





2. Pelatihan Mencukur





### 3. Pelatihan Pengemasan





4. Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan





### Sasaran Strategis 3 : MENINGKATNYA PENJUALAN USAHA MIKRO

Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
Persentase Meningkatnya Volume Omset Usaha	11,76%	11,76%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat ada capaian sebesar 11,76 % pada tahun 2024, hal ini dikarenakan ada kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya permintaan pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran diatas yaitu diadakannya pelatihan kerajinan tangan, pelatihan mencukur, pelatihan pengemasan dan pelatihan pengolahan bahan makanan. Dimana pelatihan ini juga mendukung untuk mencapai sasaran sebelumnya yaitu Meningkatnya wirausaha baru yang mandiri.

1.

#### Sasaran Strategis 4 : BERKEMBANGNYA PRODUK USAHA MIKRO

2.

Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIA N
Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang naik kelas	0,52%	0,52%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat ada capaian sebesar 0,52 % pada tahun 2024, hal ini dikarenakan ada kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya permintaan pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran diatas yaitu diadakannya pelatihan kerajinan tangan, pelatihan mencukur, pelatihan pengemasan dan pelatihan pengolahan bahan makanan. Dimana pelatihan ini juga mendukung untuk mencapai sasaran sebelumnya yaitu Meningkatnya wirausaha baru yang mandiri.

1.

#### Sasaran Strategis 5 : MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU USAHA/UMKM YANG TERDAFTAR DI KATALOG

2.

Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIA N
Jumlah UMKM yang terdaftar e-katalog	146 orang	146 orang	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat ada capaian sebesar 146 orang pada tahun 2024, hal ini dikarenakan ada kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya permintaan pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran diatas yaitu diadakannya pelatihan kerajinan tangan, pelatihan mencukur, pelatihan pengemasan dan pelatihan pengolahan bahan makanan. Dimana pelatihan ini juga mendukung untuk mencapai sasaran sebelumnya yaitu Meningkatnya wirausaha baru yang mandiri.

**Sasaran Strategis 6 : MENINGKATNYA JUMLAH KOPERASI AKTIF**

Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
Jumlah Koperasi Aktif	40 buah	40 buah	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat ada capaian sebesar 40 buah pada tahun 2024, hal ini dikarenakan ada kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya permintaan pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran diatas yaitu diadakannya pelatihan kerajinan tangan, pelatihan mencukur, pelatihan pengemasan dan pelatihan pengolahan bahan makanan. Dimana pelatihan ini juga mendukung untuk mencapai sasaran sebelumnya yaitu Meningkatnya wirausaha baru yang mandiri.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkannya wirausaha baru yang mandiri, Meningkatnya Penjualan usaha Mikro, Berkembangnya Produk usaha Mikro, meningkatnya jumlah pelaku usaha/umkm yang terdaftar di Katalog serta Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Masih rendahnya SDM pelaku usaha pada UMKM dan pengurus serta pengelola Koperasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Masih belum meratanya kemampuan UMKM dalam bentuk permodalan ;
3. Masih terbatasnya jumlah Usaha Mikro yang bisa naik kelas menjadi usaha kecil;
4. Masih rendahnya kemampuan pengunjung atau wisatawan yang berbelanja produk UMKM.
5. Perlunya disediakan anggaran khusus untuk menilai apakah koperasi itu masih

aktif dan sehat, hal ini dikarenakan penilaian dilakukan oleh pihak ke tiga.

Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) yaitu :

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi Sumber Daya Manusia pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah dan pengurus serta pengelola Koperasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Koordinasi intens dengan stakeholder terkait pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
3. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat untuk dapat terus berkoperasi, melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan bagi koperasi agar menjadi koperasi sehat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, anggota koperasi tentang pentingnya koperasi dalam kehidupan sehari-hari;
4. Pemberian bantuan usaha dan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Sehat.

TUJUAN 2	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
----------	---

Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi pada capaian RPJMD yaitu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan.

Tabel 3.10

Capaian Tujuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan :

Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
------------------	-------------	----------------	-----------

Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB	5,50%	5,06%	92%
--	-------	-------	-----

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan di suatu daerah.

Untuk mencapai tujuan yaitu “Produk Domestik Regional Bruto (PRB) Sektor Industri Pengolahan, terdapat sasaran strategis 2, yaitu :

**SASARAN STRATEGIS 7 : BERKEMBANGNYA PRODUK INDUSTRI KECIL**



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase Peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	0,65%	0,65%	100 %

Dari tabel diatas didapat pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan Industri Kecil Naik Kelas sebesar 0,65 %, hal ini didapat karena banyak produk industri kecil yang semakin berkembang dimana jumlah yang memiliki Nomor Induk Berusaha semakin meningkat dimana pada tahun 2024 tercatat ada 2392 buah industri mikro dan kecil yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha.

Untuk meningkatkan persentase peningkatan industri kecil naik kelas dilakukan berbagai cara diantaranya pelaksanaan pelatihan P-IRT, bimbingan Like Higienis serta Penguatan Kualitas IKM Sasirangan

1. Pelatihan P-IRT bagi IKM Pangan, kegiatan ini diikuti oleh IKM pangan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari IKM Pangan Industri Rumah tangga yang belum memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Diharapkan hasil dari pelatihan ini adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), karena SPP-IRT merupakan bukti komitmen pelaku usaha untuk menjaga keamanan, mutu, gizi dan label pangan yang diproduksi.



## 2. Bimbingan Teknis Like Hieginis Bagi Rumah Makan/Catering

Bimbingan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Bagi IKM pangan yang mempunyai rumah makan/catering ada di Hulu Sungai Selatan agar dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan akan penanganan makanan secara benar maupun terampil dalam pengelolaan sanitasi. Bimbingan ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari IKM pangan yang mempunyai rumah makan/catering yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik. Output yang diharapkan setelah pelaksanaan pelatihan ini adalah IKM pangan yang mempunyai rumah makan/catering bisa memproduksi makanan siap saji yang aman dan memiliki kualitas mutu tinggi.



### 3. Penguatan Kualitas produksi pada IKM Sasirangan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bagi IKM seluruh komoditi yang ada di Hulu Sungai Selatan baik dari segi perizinan usaha maupun kualitas pemasarannya. Peserta pelatihan berasal dari 10 IKM sasirangan di Kab. HSS dan 10 orang siswa/siswi yang mempunyai potensi untuk membuat produk sasirangan. Output dari pelatihan ini diharapkan IKM yang ada bisa lebih baik dari segi produk maupun pemasaran dalam bentuk digitalisasi.



**SASARAN STRATEGIS 8 : MENINGKATKAN JUMLAH PRODUK  
INDUSTRI KECIL E-KATALOG**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
Meningkatkan Jumlah Produk industri kecil e-katalog	Jumlah Industri kecil e-katalog	146 orang	146 orang	100%

Berdasarkan data diatas capaian sasaran strategis mencapai 100% hal ini dikarenakan adanya pendampingan baik dari bidang industri melalui pelatihan dan bimbingan maupun pada bagian pengadaan barang dan jasa yang mengelola pendaftaran pada aplikasi LKPP untuk mendaftar di e-katalog.

### **3.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target**

#### **Akhir Renstra**

Berdasarkan capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai dengan Tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja pada akhir Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024- 2026 maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Indikator sasaran 2, Persentase wirausaha baru yang mandiri setiap tahun terus meningkat, hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak dinas lingkup Kab. HSS dan Dinas Provinsi.

Capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil menengah dan Perindustrian Tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja pada akhir Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.9**  
**PERBANDINGAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024 DENGAN**  
**TARGET AKHIR RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN**  
**PERINDUSTRIAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN		REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	DEVIASI REALISASI TARGET KINERJA SASARAN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENSTA	
			2024	2026			KURANG/LEBIH	%
1	Meningkatnya perluasan Kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	97,90%	98,12%	97,89%	99,98%	-(0,02)	0,02%
2	Meningkatnya wirausaha baru yang mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	0,11%	0,13%	0,11%	100%	0	0%
3	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha	11,76%	14,70%	11,76%	100%	0	0%
4	Berkembangnya Produk Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas	0,52%	0,54%	0,52%	100%	0	0%
5	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha/UMKM yang terdaftar di Katalog	Jumlah UMKM yang terdaftar e-Katalog	146 orang	160 orang	146 orang	100%	0	0%
6	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	40 buah	42 buah	40 buah	100%	0	0%
7	Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase Peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	0,65%	0,69%	0,65%	100%	0	0%
8	Meningkatkan Jumlah Produk Industri Kecil e-katalog	Jumlah Industri kecil di E katalog	146 orang	148 orang	146 orang	100%	0	0%

### 3.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Daerah Lain

Penyajian Capaian kinerja pada tahun sebelumnya dalam laporan kinerja tahun berjalan adalah sesuai dengan rekomendasi pada LAKIP Tahun 2023 dimana Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian diminta untuk memasukkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Data pembanding yang relevan dan spesifik untuk dapat digunakan baik dengan daerah lain maupun Provinsi Tahun 2024 belum bisa didapatkan karena data BPS Tahun 2024 kabupaten lain belum dipublish dan berbeda sasaran yang akan dicapai masing-masing Kabupaten/Kota.

### 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Realisasi

Secara garis besar capaian realisasi target 2024 sudah memenuhi target, hal ini dikarenakan banak kegiatan yang dilaksanakan dimana kegiatan itu menunjang pencapaian target kinerja. Untuk target PAD sekitar Rp. 50.000.000,00 dari pemakaian kekayaan daerah tidak tercapai karena banyak pengrajin industri kecil menengah yang memanfaatkan karena sudah memiliki peralatan yang sama.

### 3.7 Alternatif Solusi Yang Telah Atau Akan Dilakukan

Sesuai rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 berikut disampaikan data rencana aksi dan solusi yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Rekomendasi LHE LAKIP Internal Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Memastikan identifikasi crosscutting yang telah dilakukan pada pohon kinerja memberikan informasi atas kinerja yang menggambarkan sharing outcome, khususnya kinerja perangkat daerah yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari Perangkat Daerah lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal.	Melakukan pendalaman atas peran serta dari masing-masing OPD dalam crosscutting dan menerapkan dalam proses kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan	Untuk pelaporan selanjutnya telah diperbaiki dengan pendampingan dari bagian organisasi
2.	Memastikan IKU telah selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LKj) dengan Penyesuaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018 – 2023.	Mempelajari kembali teknis penyusunan laporan kinerja dan melakukan perbaikan kekurangan atas data yang belum disajikan dalam laporan kinerja yang disusun serta meminta pendampingan penyusunan laporan kinerja dengan bagian organisasi.	Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan	Untuk pelaporan selanjutnya telah diperbaiki dengan pendampingan dari bagian organisasi

3.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan dan melaksanakan sinkronisasi/penyesuaian Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj) dengan mengacu pada penyesuaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023. Tahun 2018-2023.	Mempelajari kembali teknis penyusunan laporan kinerja, melakukan sinkronisasi/penyesuaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja dan melakukan perbaikan kekurangan atas data yang belum sesuai dengan data sebelumnya yang ada pada Penyesuaian Renstra serta meminta pendampingan penyusunan laporan kinerja dengan bagian organisasi.	Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan	Untuk pelaporan selanjutnya telah diperbaiki dengan pendampingan dari bagian organisasi
4.	Sinkronisasi target dan realisasi capaian kinerja pada fitur perencanaan dan evaluasi dan penginputan rencana aksi pelaksanaan pengukuran kinerja berkala dengan dilengkapi analisis dan bukti dukung pada aplikasi e-Sakip <a href="https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id">https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id</a> .	Melakukan penelaahan kembali atas analisa dan data dukung yang di masukkan pada aplikasi e sakip HSS dan yang ada pada laporan kinerja kemudian melakukan cross check kepada bidang urusan yang melaksanakan kemudian memasukkan analisa yang lebih mendalam terkait pencapaian target kedalam laporan kinerja dengan mendapat pendampingan dari bagian Organisasi.	Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan	Untuk pelaporan selanjutnya telah diperbaiki dengan pendampingan dari bagian organisasi

### 3.8 Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun realisasi anggaran berdasarkan program yang mendukung sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

### Hal 3.9. Analisis Efektifitas dan Efisiensi

Dari Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dapat di analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja(Realisasi Kinerja/Target Kinerja)*100	Ket
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	97,90 %	97,89%	99,98%	Efektif
2	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	Persen	0,11%	0,11%	100%	Efektif
3	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha	Persen	11,76%	11,76%	100%	Efektif
4	Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,52%	0,52%	100%	Efektif
5	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha/UMKM yang Terdaftar di katalog	Jumlah UMKM yang terdaftar e Katalog	Orang	146 orang	146 orang	100%	Efektif
6	Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Buah	40 buah	40 buah	100%	Efektif
7	Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	Persen	0,65%	0,65%	100%	Efektif
8	Meningkatnya Jumlah Produk Industri Kecil di e Katalog	Jumlah Industri Kecil di E katalog	Orang	146 orang	146 orang	100%	Efektif
<b>Tingkat Efektivitas Sasaran</b>						<b>99,99%</b>	Efektif

Hasil Pengukuran kinerja tingkat efektifitas dari sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan bervariasi namun secara keseluruhan tingkat didapatkan hasil Efektif dengan Capaian 99,99%.

b. Efisiensi Kinerja

No.	Sasaran Target	Indikator	Target Kinerja (a)	Realisasi Kinerja (b)	Capaian Kinerja (c)= (b/a)*100	Pagu Anggaran (d)	Realisasi Anggaran (e)	Capaian Realisasi Anggaran (f) = (e/d)*100	Efisien (g) = c/f x 100%	Ket
1	<b>Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)</b>	<b>97,90 %</b>	<b>97,89 %</b>						
2	<b>Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri</b>	<b>Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>						
3	<b>Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha</b>	<b>11,76%</b>	<b>11,76%</b>						
4	<b>Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,52%</b>						
5	<b>Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha/UMKM yang Terdaftar di katalog</b>	<b>Jumlah UMKM yang terdaftar e Katalog</b>	<b>146 orang</b>	<b>146 orang</b>						
6	<b>Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif</b>	<b>Jumlah Koperasi Aktif</b>	<b>40 buah</b>	<b>40 buah</b>						
7	<b>Berkembangnya Produk Industri Kecil</b>	<b>Persentase peningkatan Industri Kecil Naik Kelas</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,65%</b>						
8	<b>Meningkatnya Jumlah Produk Industri Kecil di e Katalog</b>	<b>Jumlah Industri Kecil di E katalog</b>	<b>146 orang</b>	<b>146 orang</b>						

### 3.10 Realisasi Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dengan jumlah anggaran **Rp. 10.061.342.061,00,-** dan telah direalisasi sebesar **Rp. 8.784.400.165,00,-** atau sebesar **87,74%**, dengan rincian sebagaimana berikut :

TABEL 3.10  
REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS  
TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN HSS

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>I</b>	<b>Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja</b>	<b>360.546.938,00</b>	<b>357.811.508,00</b>	<b>81,66%</b>
	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>360.546.938,00</b>	<b>357.811.508,00</b>	99,65%
	2. Program Penempatan Tenaga kerja	51.999.950,00	45.857.150,00	77,83%
	3. Program Hubungan Industrial	71.951.350,00	69.161.350,00	48,38%
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Intensifikasi Pelaku Industri Pengolahan</b>	<b>6.350.802.809,00</b>	<b>4.432.557.762,00</b>	<b>69,79%</b>
	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.417.963.700,00	1.255.331.634,00	69,79%
	2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1.953.350,00	0,00	0,00%
	3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.999.700,00	13.783.500,00	

<b>III</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan Mendorong UMKM Naik Kelas</b>	911.730.685,00	839.806.455,00	94,28%
------------	--	----------------	----------------	--------

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS / PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
4.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	49.999.850,00	32.772.750,00	65,55%
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	164.883.500,00	161.236.250,00	93,37%
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	696.847.335,00	645.797.455,00	94,64%
<b>IV</b>	<b>Memastikan Perencanaan Kinerja berkualitas</b>	6.549.724.315,00	5.569.770.068,00	82,58%
	<b>Memastikan Pengukuran Kinerja Tersedia</b>			
	<b>Memastikan Pelaporan Kinerja Berkualitas</b>			
	<b>Memastikan Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>			
	<b>Memastikan Target Capaian Tercapai</b>			
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.212.976.188,00	5.569.770.068,00	82,58%
<b>TOTAL</b>		<b>10.011.342.061,00</b>	<b>8.784.400.165,00</b>	<b>87,74%</b>

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA

Berdasarkan capaian kinerja yang dicapai tahun 2024 sebesar 87,74% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 76,12% maka menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran pada Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL 3.11**  
**REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA**









NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	%
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Rp. 394.981.738,00	97,89%	
2.	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	Rp. 696.847.335,00	0,11%	
3.	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha	Rp.	11,76%	
4.	Berkembangnya Produk Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas	Rp.	0,52%	
5.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha/UMKM yang Terdaftar di Katalog	Jumlah UMKM yang terdaftar e Katalog	Rp.	146 orang	
6.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Rp.193.209.000,00	40 buah	
7.	Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	Rp.1.198.193.783,00	0,65%	
8.	Meningkatnya Jumlah Produk Industri Kecil di e Katalog	Jumlah Industri Kecil di E katalog	Rp.	146 orang	
RATA-RATA			Rp. 2.483.231.856,00		






Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 8 (delapan)

sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024 maka diperoleh hasil 8 (delapan) sasaran capaian kinerjanya sangat baik.

Pencapaian terhadap sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.12**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	%	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja(TKK)	97,90 %	97,89%	99,98%	
2.	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	0,11%	0,11%	100%	
3.	Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha	11,76%	11,76%	100%	
4.	Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Naik Kelas	0,52%	0,52%	100%	
5.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha/UMKM yang Terdaftar di katalog	Jumlah UMKM yang terdaftar e Katalog	146 orang	146 orang	100%	
6.	Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	40 buah	40 buah	100%	
7.	Berkembangnya Produk Industri Kecil	Persentase peningkatan Industri Kecil Naik Kelas	0,65%	0,65%	100%	
8.	Meningkatnya Jumlah Produk Industri Kecil di e Katalog	Jumlah Industri Kecil di e katalog	146 orang	146 orang	100%	

Keterangan	:		Capaian > 90%	:	Sangat baik
			Capaian > 75% - 89,99%	:	Baik
			Capaian > 65% - 74,99%	:	Cukup
			Capaian < 50% - 64,99%	:	Kurang
			Capaian < 0% - 49,99%	:	Sangat Kurang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama secara efektif telah diharapkan dapat mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan Laporan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEPALA DINAS



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670328 198609 2 001